



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : UNIT INDUK PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN (UIP3B)  
: SULAWESI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **JAROT SETYAWAN**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **206567**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 6.580.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/219 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Bangunan Seluas 3655 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 4 m2/4 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 860.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
3. MOBIL, WULING AIR EV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. ---****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.198.574.624
F. HARTA LAINNYA	Rp.	199.000.000
Sub Total	Rp.	8.837.574.624
III. HUTANG	Rp.	15.015.212
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.822.559.412

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.